

SAHABAT

SIAGA HADAPI BENCANA TASIKMALAYA

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jln. Otto Iskandardinata No. 19 Tasikmalaya Telepon dan Fax : (0265) 334111
website : bpbd.tasikmalayakab.go.id Email : bpbd@tasikmalayakab.go.id

Tasikmalaya - 46111



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Otto Iskandardinata No. 19 Tasikmalaya Telp dan Fax (0265) 334111
Website : bpbdtasikmalayakab.go.id Email : bpbdt@tasikmalayakab.go.id
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : *Kep. 833/300.2.1/BPBD/2025*

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 360 ayat (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Bertita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 30);
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 43);
30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor);
31. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor KU.02.05/Kep.223-BPKPD/2024 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dalam menyiapkan dan menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;

- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 8 April 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. NURÆDIDIN, S.IP.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650504 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tasikmalaya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya (sebagai laporan);
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : Kep. 833 / 300.2.1 / BPBD / 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025.

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
4. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran;
5. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
6. Perencana Ahli Pertama.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. NURAEEDIDIN, S.IP.

Pemuda Utama Muda, IV/c
NIP. 19650504 198403 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Badan yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip- prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ

tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 360 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Perubahan rencana Kerja Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Harapan kami Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan dijadikan acuan untuk pencapaian kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya secara optimal.

Akhir kata, semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terselenggara secara lebih terarah, efektif, efisien, akuntabel serta dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tasikmalaya, 23 Juli 2025

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya,



Drs. YAYAT SURYATNA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660604 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
Bab I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN	II-1
2.1 Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Indikator Renstra	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	

.....	II-10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan	II-12
Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tasikmalaya	III-2
Bab IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-3
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Sampai Dengan Tahun Berjalan (2025)	II-9
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025	II-12
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	III-4

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pememerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Perubahan Rencana Kerja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Rencana Kerja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa



yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka hubungan dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen lainnya dari mulai tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten, menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dalam penuangan dan penyusunannya memperhatikan pula kebijakan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya meskipun belum secara sah atau legal baru berupa draft, sehingga menjadi sinergis dan konsisten dalam perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Lebih lanjut adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 360 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Perubahan rencana Kerja Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Perubahan Rencana Kerja ini dalam implementasinya menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka memenuhi target sebagai perwujudan kinerja yang berlandaskan kepada kemampuan anggaran pada setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 - 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 13 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2026;
 - 14 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- 18 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
- 19 Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0022 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional:

- a Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perubahan (RKAP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2025.
- b Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum, Tata ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Indikator Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Indikator Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan. Sementara itu Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 (Tahun Berjalan) dapat dilihat pencapaiannya pada laporan triwulan terakhir saat penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025.

Pada tahun 2024, Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 12.697.262.872,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.367.097.985,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Sembilan

Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau (97,39%) yang meliputi 3 Program, 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 330.164.887,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau (2,61%) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov). Sementara itu pada Tahun Anggaran 2025, dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 9.743.438.866,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.920.799.279,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau (19,71%). Yang meliputi 3 Program, 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdapat evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian indikator Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Indikator Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Target Indikator Kinerja (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sampai dengan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

1	05	01			Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	47	47,68	46	74,1	161,09	47	0,00	0,00
					IKM	76	83	75	0	0	76	0	0,00
1	05	01	2.01		jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	65	39	13	13	100	13	55	84,62
1	05	01	2.01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	9	3	3	100	3	13	86,67
1	05	01	2.01	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	30	10	10	100	10	42	84,00
1	05	01	2.02		Jumlah pemenuhan administrasi keuangan sesuai kebutuhan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	01	2.02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	36	12	12	100	12	51	85,00

1	05	01	2.06		cakupan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100	100%	85%	85,00
1	05	01	2.06	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	01	2.06	05	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	01	2.06	06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	01	2.06	08	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	01	2.06	09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	01	2.08		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	120	24	24	24	100	24	102	85,00

1	05	01	2.08	02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	01	2.08	04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	01	2.09		jumlah pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	260	52	52	52	100	52	217	83,46
1	05	01	2.09	01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	180	108	36	36	100	36	153	85,00
1	05	01	2.09	09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	12	4	4	100	4	16	80,00
1	05	01	2.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	36	12	12	100	12	48	80,00
1	05	03			persentase kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100%	100%	100%	100%	100	100%	97%	97,00

1	05	03	2.02		Persentase aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100%	100%	100%	100%	100	100%	155%	155,00
1	05	03	2.02	02	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	250	50	100	100	100	50	150	60,00
1	05	03	2.02	03	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	03	2.02	10	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250	100	700	700	100	100	800	320,00
1	05	03	2.03		jumlah laporan dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50	36	12	12	100	10	48	96,00
1	05	03	2.03	03	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50	36	10	10	100	10	48	96,00
1	05	03	2.04		jumlah laporan penguatan kelembagaan dalam penanganan pasca bencana	5	1	1	1	100	1	2	40,00

1	05	03	2.04	06	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	5	1	1	1	100	1	2	40,00
1	05	04			Persentase pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40,00
1	05	04	2.01		Persentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40,00
1	05	04	2.01	02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	12	12	12	100	12	24	40,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Sampai dengan Tahun Berjalan (Tahun 2025)

NO	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi Realisasi			Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Nilai Indeks Risiko Bencana	Poin	174,13	165,43	157,15	149,3	145,5	157,15	149,3		
2	Nilai Kapasitas/ Ketahanan Daerah	Poin	0,64	0,73	0,84	0,97	0,64	0,84	0,97		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yang mengemban urusan wajib pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, serta menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan BPBD yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta system perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih sedikit desa tangguh bencana;
- 2) Belum terwujudnya keterpaduan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 3) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana;
- 4) Belum dimilikinya secara keseluruhan dokumen rencana kontingensi

untuk semua jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- 5) Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana serta personil kebakaran.
- 7) Dengan mempertimbangkan permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka dapat ditetapkan isu strategis untuk Rencana Strategis adalah sebagai berikut :
- 8) Perlunya Penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat;
- 9) Perlunya Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- 10) Perlunya alokasi anggaran dalam penanggulangan bencana yang memadai;
- 11) Perlunya Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 12) Perlunya dokumen strategis dalam penanggulangan bencana;
- 13) Perlunya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Penanggulangan bencana yang handal;
- 14) Ketersediaan logistik bantuan PB;
- 15) Peningkatan Peran masyarakat, Dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- 16) Perluasan informasi pelaksanaan PB.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				12.391.535.059					9.743.438.866	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.391.535.059					9.743.438.866	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.391.535.059					9.743.438.866	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tasikmalaya	Nilai Evaluasi SAKIP	47 Poin	6.407.155.059	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tasikmalaya	Nilai Evaluasi SAKIP	47 Poin	6.712.928.566	
			Nilai IKM	76 Poin				Nilai IKM	76 Poin		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	80.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	52.679.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.935.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	16.744.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	100%	4.724.155.059	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	100%	5.177.060.366	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	4.724.155.059	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	5.177.060.366	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	453.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	333.190.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	167.350.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	31.500.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundangan yang disediakan	12 Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundangan yang disediakan	12 Dokumen	8.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.300.000	
	Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.040.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai kebutuhan	100%	175.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai kebutuhan	100%	175.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	105.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang milik Daerah sesuai kebutuhan	100%	975.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang milik Daerah sesuai kebutuhan	100%	974.998.800	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	800.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	799.998.800	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	50 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50 Unit	100.000.000	

	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	3.554.000.000	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	2.942.910.300	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	500.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	395.296.400	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	395.296.400	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Kecamatan/Desa yang terbina Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana	100%	2.254.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Kecamatan/Desa yang terbina Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana	100%	1.920.613.900	

	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah aparaturn dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	380 Orang	300.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah aparaturn dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	97.907.200	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	100.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	80.706.700	

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	1.764.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	1.742.000.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase pendampingan korban Terdampak Bencana yang sesuai standar	100%	650.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase pendampingan korban Terdampak Bencana yang sesuai standar	100%	562.000.000	

	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	550.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	800 Orang	562.000.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	100%	150.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	100%	65.000.000	

<p>Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota</p>	<p>Kab. Tasikmalaya</p>	<p>Jumlah Penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>150.000.000</p>	<p>Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota</p>	<p>Kab. Tasikmalaya</p>	<p>Jumlah Penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>65.000.000</p>	
<p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>	<p>Kab. Tasikmalaya</p>	<p>Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan selama setahun</p>	<p>100%</p>	<p>2.430.380.000</p>	<p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>	<p>Kab. Tasikmalaya</p>	<p>Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan selama setahun</p>	<p>100%</p>	<p>87.600.000</p>	

	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan selama setahun	100%	2.430.380.000	Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan selama setahun	100%	87.600.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	100.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	87.600.000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 Tentang Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tasdikmalaya, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Selain itu Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai upaya strategis dalam menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Fokus utama rencana kerja ini adalah menjamin hak dasar masyarakat terhadap perlindungan dan keselamatan dari ancaman bencana melalui penyelenggaraan

pelayanan dasar yang mencakup diantaranya :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
4. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota;
5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Berdasarkan surat Kemendagri nomor 300.2.8/e.1071/BAK tanggal 7 Oktober 2024 tentang Prioritas Penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Daerah dan surat kemendagri nomor 300.1.7/4344/SJ tanggal 15 Agustus 2023 tentang Optimalisasi Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan daerah terdapat beberapa Sub Kegiatan yang diwajibkan dalam rangka mendukung pemenuha penerapan SPM sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran di daerah diantaranya :

- 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
- 2) Penyusunan Penyusunan Rencana Kontijensi
- 3) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
- 5) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 6) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- Kabupaten/Kota
- 7) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ kota
 - 8) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 9) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
 - 10) Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 11) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - 12) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 13) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah seperti yang di tunjukan pada table 3.1 dibawah ini :



Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODEN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								12.391.535.059,00	9.945.160.366,00	9.743.438.866,00	-2.648.096.193,00							9.280.270.565,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.391.535.059,00	9.945.160.366,00	9.743.438.866,00	-2.648.096.193,00							9.280.270.565,00		
1,05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.391.535.059,00	9.945.160.366,00	9.743.438.866,00	-2.648.096.193,00							9.280.270.565,00		

1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.407.15 5.059,00	6.843.56 0.366,00	6.712.92 8.566,00	573.115.50 6,00						6.980.27 0.565,00	
	1.05.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.00 0,00	60.000.0 00,00	52.679.0 00,00	- 27.321.000, 00			Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-		80.000.0 00,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							6 Dokumen	3 Dokumen	50.000.00 0,00	40.000.0 00,00	35.935.0 00,00	- 14.065.000, 00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		50.000.0 00,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							4 Laporan	10 Laporan	30.000.00 0,00	20.000.0 00,00	16.744.0 00,00	- 13.256.000, 00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		30.000.0 00,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.724.155 .059,00	5.177.06 0.366,00	5.177.06 0.366,00	452.905.30 7,00			Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penang	-		5.197.27 0.565,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	-84.700.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	188.200.000,00	111.040.000,00	11.040.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-				-	-	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00			-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-	175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-				-	-	975.000.000,00	975.000.000,00	974.998.800,00	-1.200,00			-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-	1.075.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				23 Unit	23 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	799.998.800,00	-1.200,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	3.554.000.000,00	3.026.000.000,00	2.942.910.300,00	1.354.000.000,00							2.200.000.000,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</i>					100 %	100 %	500.000.000,00	400.000.000,00	395.296.400,00	-104.703.600,00			-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																			

			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>					540 Oran g	540 Oran g	100.000.000,00	0,00	0,00	- 100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>					1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	395.296.400,00	- 4.703.600,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		-					-	-	2.254.000.000,00	1.964.000.000,00	1.920.613.900,00	- 333.386.100,00			-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-	600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																			

			<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>				138 Unit	138 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>				380 Orang	100 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	97.907.200,00	-202.092.800,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>				12 laporan	12 laporan	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	1.742.000.000,00	- 22.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>				50 Kawasan	1 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	80.706.700,00	- 19.293.300,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		<i>Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				-	100 %	650.000.000,00	562.000.000,00	562.000.000,00	- 88.000.000,00			-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>				10 Orang	800 Orang	550.000.000,00	562.000.000,00	562.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	- 100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		-				-	-	150.000.000,00	100.000.000,00	65.000.000,00	- 85.000.000,00			-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dinyatakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	65.000.000,00	- 85.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			<i>sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>																	
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-					2.430.380.000,00	75.600.000,00	87.600.000,00	2.330.380.000,00							100.000.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-					2.430.380.000,00	75.600.000,00	87.600.000,00	2.342.780.000,00			Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana				100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman</i>					12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	75.600.000,00	87.600.000,00	12.400.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penangg	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>				483 Unit	483 Unit	2.030.380.000,00	0,00	0,00	- 2.030.380.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
J U M L A H									12.391.535.059,00	9.945.160.366,00	9.743.438.866,00	- 698.682.445.469,50					9.280.270.565,00		


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RPJMD dan Renstra di tahun 2025, serta menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja serta harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran Perubahan (RKAP) untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan RPJMD dan Renstra di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra dapat dicapai, Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana akan Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat sasaran. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Perubahan Renja ini ke dalam RKAP, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKAP yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan



kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Hasil evaluasi yang di dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan pada optimalitas pencapaian target tahunan RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak, sehingga Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini dapat tersusun. Semoga keberhasilan Perubahan Rencana Kerja ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan bersama.



**SAHABAT
SIAGA HADAPI BENCANA TASIKMALAYA**